BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

LAPORAN TAHUNAN 2014

Annual Report





BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jika memerlukan laporan tahunan ini, silakan hubungi:
For additional copies of this annual report, please contact:
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Center for Research, Promotion and Cooperation

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl.Raya Jakarta Bogor KM. 46
Cibinong 16911, Indonesia
Telp : 62-21-8752062, 63 / 8753155
Fax: 62-21-87916647
Email: info@big.go.id
Website: www. big.go.id
Geoportal: tanahair.indonesia.go.id

Priyadi Kardono, Narasumber | *Resource Person*
Titiek Suparwati, Narasumber | *Resource Person*
Dodi Sukmayadi, Narasumber | *Resource Person*
Nurwadjedi, Narasumber | *Resource Person*
Yusuf Surachman, Narasumber | *Resource Person*

Wiwin Ambarwulan, Penanggung Jawab | *Responsible Person*

Wiwin Ambarwulan, Penyunting | *Editor*
Sri Lestari Munajati, Penyunting | *Editor*
Sri Hartini, Penyunting | *Editor*

Dian Ardiansyah, Penyusun | *Compiler*
Luciana Retno Prastiwi, Penyusun | *Compiler*
Jay Soetija, Penyusun | *Compiler*

Sri Hartini, Penerjemah | *Translator*
Meilani Ardaya, Penerjemah | *Translator*

Kontributor | *Contributor*

Tommy Nautico
Seto Baruno
Arief Donie Prasetya
Agung Teguh Madira
Arisauna Maulidyan Pahlevi
Yoniar Hufan Ramadhani
Dyah Pangastuti
Bayu Triyogo Widyantoro
Tunjung Wismadi
Roswidyatmoko Dwihatmojo
Farid Yuniar
Gatot Haryo Pramono
Yusniar Rahayu Ristriantri
Rastika Widiastuti
Eli Juniati
Ilham Maulana
Siti Nurhasanah
Ratih Destarina
Eko Artanto
Lulus Hidayatno
Elyta Widyaningrum
Arini Fadhila
Yusnita Permana
Titin Hayati
Yudi Irwanto
Mone Iye Cornelia Marschiavelli
Romario Bahama Lazuardi
Inggit Diah Novitaningrum

Nuruli Khotimah, Tata Letak & Disain | *Layout & Design*
Rachman Az-zikra, Tata Letak & Disain | *Layout & Design*



Daftar Isi

Table of Content

Daftar Isi 5
Table of Content

Dari Pimpinan 10
From the Head of BIG

Sejarah BIG 12
History of BIG

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial 2013-2014 16
The Strategic Planning of Geospatial Information Agency 2013-2014

SEKRETARIAT UTAMA 19
MAIN SECRETARIAT

Sasaran Strategis 20
Strategic Objective

Sumber Daya Manusia 22
Human Resources

Penerimaan CPNS BIG Formasi Tahun 2014 24
CPNS Recruitment of BIG for Formation 2014

Layanan Peta 28
Map Services

Layanan Laboratorium Geospasial 30
Geospatial Laboratory Services

Layanan Diklat 32
Training Services

INFORMASI GEOSPASIAL DASAR 35
BASIC GEOSPATIAL INFORMATION

Penyelenggaraan Pemetaan Rupabumi 36
Topographic Mapping

Verifikasi Toponim 40
Toponym Verification

Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika 42
Geodetic Control and Geodynamics Network

Pemetaan Batas Negara dan Pemetaan Pulau-Pulau Terluar 46
Mapping of State Boundaries and Outermost Islands

Fasilitasi Perundingan 50
Facilitation of Negotiation

Kajian Batas Maritim 54
Study on Maritime Boundary

Batas Wilayah Administrasi 58
Boundaries Administration

Pembuatan Peta Wilayah Kecamatan/Kelurahan dan Ajudikasi di Lapangan 60
Provision of Sub-District/Village Map and Adjudication

Permasalahan Batas Wilayah Administrasi 68
Issues on Administrative Boundaries

Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai 70
Marine and Coastal Environment Mapping

Pembuatan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) 72
Mapping of the Indonesia Coastal Environment (ICE)

Pembuatan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) 74
Mapping of National Marine Environment (NME)

Pemetaan dan Integrasi Informasi Geospasial Kelautan Nasional 76
National Mapping and Marine Geospatial Information Integration

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK 79
THEMATIC GEOSPATIAL INFORMATION

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) 80
Provision of Thematic Geospatial Information (IGT)

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 92
Mapping of Spatial Planning and Atlas

Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata Ruang 96
Assistance and Supervision Spatial Planning Mapping

Pembinaan Penerbit Atlas 98
Coaching Atlas Publisher

Pembuatan Atlas Taktual Indonesia 100
Development of the Indonesia Tactual Atlas

Penyusunan Peta NKRI Tahun 2014 104
The Development of NKRI version 2014

Penyusunan Pedoman Basis Data Tata Ruang 112
Development of Guideline for Spatial Planning Database

INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL 115
INFRASTRUCTURE OF GEOSPATIAL INFORMATION

Ina-Geoportal 116
Ina-Geoportal

Pengembangan Pusat Data Geospasial 118
National Development Data Center

Pembangunan dan Pengembangan e-Government BIG 118
BIG e-Government Development

Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial 130
Standardization and Institutionalization of Geospatial Information

Kondisi SDM IG di Indonesia 138
GI HR Condition in Indonesia

ACARA BIG 143
EVENT OF BIG

Rapat Koordinasi Nasioanal Informasi Geospasial Tahun 2014 144
National Coordination Meeting on Geospatial Information 2014

Pekan Geospasial Nasional BIG "Selamatkan Bumi dengan Informasi Geospasial" 146
BIG National Geospatial Week - "Save the Earth with Geospatial Information"

Lomba Gambar Peta untuk Anak 2014 Kembali Digelar di BIG 148
BIG Organized Children Map Drawing Competition

Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah Dimanfaatkan

To be a Leading Agency in Providing Reliable, Integrated and Manageable Geospatial Information


REPUBLIK RAKYAT CINA
TAIWAN TIMUR
HONGKONG
FILIPINA
INDONESIA
AUSTRALIA



Dari Pimpinan BIG

"Tak kenal maka tak sayang" adalah ungkapan yang pas ditujukan untuk Badan Informasi Geospasial (BIG). Masyarakat boleh jadi tidak akan mengerti apa itu BIG, tanpa mendapatkan informasi yang jelas dan terinci mengenai institusi ini. Padahal BIG, yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini, merupakan satu-satunya lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan informasi geospasial di Indonesia.

Tugas ini sangat penting untuk menghasilkan berbagai informasi geospasial dasar maupun informasi geospasial tematik, yang akan diberbagi-pakaikan dan disebarluaskan melalui infrastruktur informasi geospasial.

Apa jadinya suatu negara tanpa didukung informasi geospasial yang andal? Produk-produk BIG sangat penting bagi pembangunan Indonesia di berbagai bidang.

Berbagai produk dihasilkan untuk mendukung pemetaan tata ruang, batas wilayah, pemetaan pulau-pulau terluar, hingga pemetaan kebencanaan, dihasilkan oleh institusi yang memiliki area perkantoran hijau di Kawasan Cibinong Science Centre ini.

Melalui Laporan Tahunan (*Annual Report*) 2014 ini, tugas dan fungsi BIG serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan disajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Informasi geospasial dapat dimiliki masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan Tahunan ini dilengkapi dengan gambar dan tabel untuk memudahkan pembaca memahami isinya. Dari buku Laporan Tahunan ini masyarakat diharapkan mengenal, semakin memahami, dan mendukung penyelenggaraan informasi geospasial bagi pembangunan berkelanjutan.

Kepala BIG

Dr. Priyadi Kardono, M.Sc

From the Head of BIG

When you do not know it, you will not love – it's probably a suitable expression could be addressed to Geospatial Information Agency (BIG). Currently, many people have not understood about BIG, until they have clear and enough information about this institution.

BIG is a Non-Ministerial Government Institution under and directly responsible to the President. This Agency is the only institution responsible for geospatial information in Indonesia. Producing a variety of basic and thematic geospatial information is the important tasks of BIG, which these geospatial products then would be shared and distributed through a geospatial information infrastructure.

What would happen if a country does not supported by reliable geospatial information?

BIG products are very important for the development of Indonesia. Several products have been prepared for supporting several activities such as spatial planning, mapping the administrative boundaries, mapping of outer islands, mapping of disaster. Those geospatial data and information have been produced by the institution that is located in a green office in the Cibinong Science Centre.

Through this Annual Report 2014, BIG's duties, functions, and its various activities are describes clearly to be beneficial of the national interest. Public can access and use the geospatial information in accordance with prevailing regulations.

This Annual Report is prepared with pictures and tables to facilitate the reader in understanding its contents. By reading this Annual Report, we expect that public would recognize the existent of BIG and have better understanding, and hence provide support to the development of geospatial information for sustainable development in Indonesia.

Head of BIG

Dr. Priyadi Kardono, M.Sc.



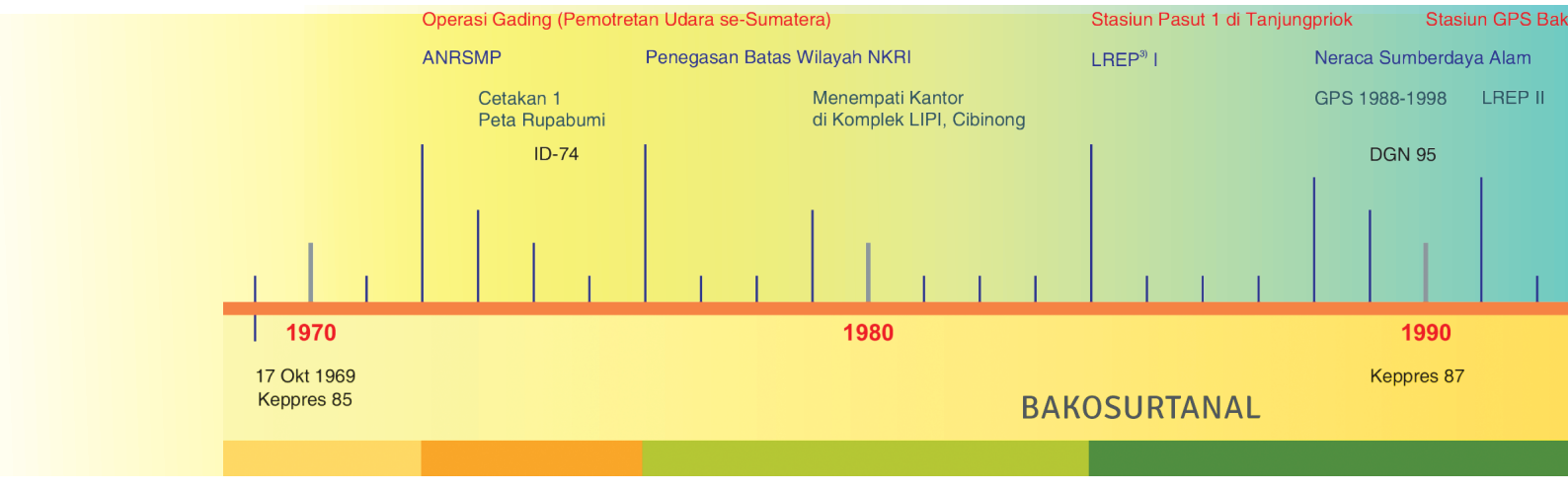
Dr. Priyadi Kardono, M.Sc.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Sejarah BIG

Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

Cikal bakal BAKOSURTANAL bermula pada 1938 saat kegiatan pengukuran dan pemetaan ditangani Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Dewan dan Komando Direktorium yang kemudian berubah menjadi Komando Survei dan Pemetaan Nasional (Kosurtanal) dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional (Desurtanal) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Perkembangan dari lembaga ini pada akhirnya dibentuklah secara khusus organisasi baru bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang disingkat dengan BAKOSURTANAL pada 1969 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 63 Tahun 1969.

BAKOSURTANAL dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan survei dan pemetaan secara nasional sehingga efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, badan-badan yang melakukan kegiatan survei dan pemetaan nasional dikoordinasikan oleh lembaga ini.



History of BIG

Geospatial Information Agency (BIG) is a non- ministerial institution that was established based on the mandate of the Law Number 4 Year 2011 about Geospatial Information as a replacement of the National Agency for Coordinating Surveys and Mapping (BAKOSURTANAL).

The origin of BAKOSURTANAL began in 1938 when activity of measurements and mapping under the Governance of Dutch East Indies. After the independence of Indonesia, the Government of Indonesia established a National Board, and Commander of Surveying and Mapping (Kosurtanal) and the Board of Surveying and Mapping (Desurtanal) that were regulated through a Presidential Decrees. Finally the Government then established a specifically new organization called the National Agency for Coordinating Surveys and Mapping that abbreviated as BAKOSURTANAL in 1969 based on Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 63 Year 1969.

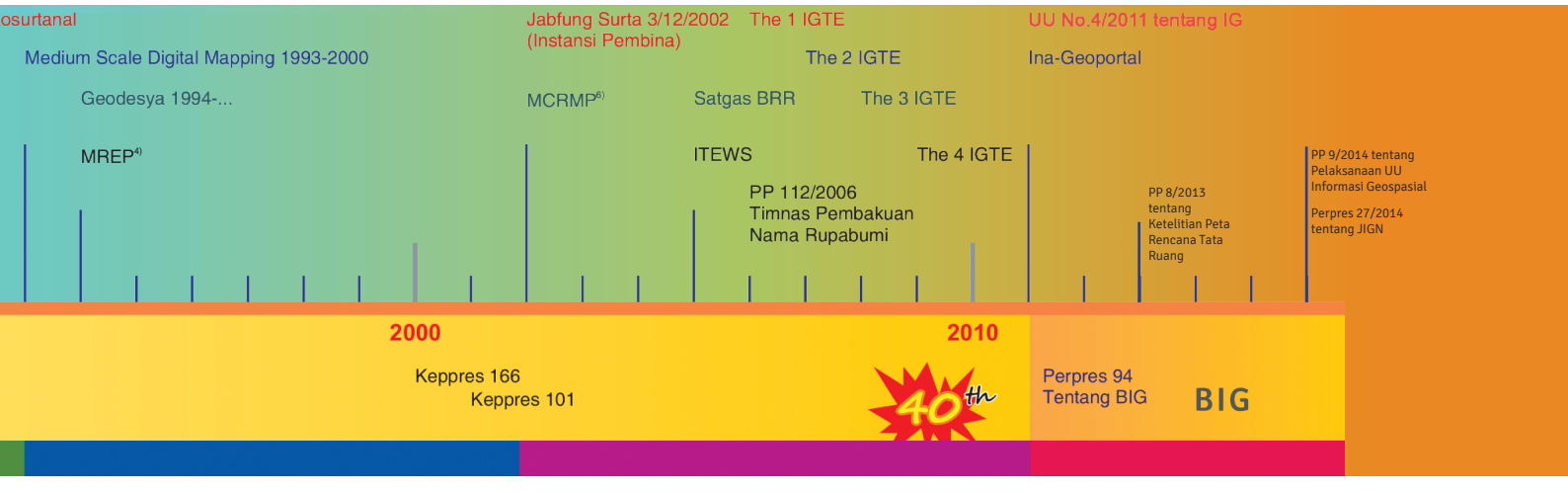
BAKOSURTANAL was established to coordinate activities and implementation of surveys and mapping nationally, to achieve its effectiveness and efficiency, including in terms of budget expenditure. Thus, the national surveys and mapping activities conducted by various agencies had been coordinated by this agency.

Kegiatan survei dan pemetaan di wilayah Republik Indonesia dilakukan untuk mendapatkan data spasial yang meliputi posisi, nama geografi, nama objek di muka rupabumi, yang disajikan dalam bentuk peta, baik secara digital maupun cetak. Data spasial ini dapat digunakan oleh pemerintah maupun swasta.

Wilayah Indonesia, yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), begitu luas, terdiri atas ribuan pulau, serta kaya sumberdaya alam dan lainnya. Untuk mengelola sumberdaya tersebut diperlukan informasi geospasial, atau yang biasa dikenal dengan istilah peta dalam arti yang luas.

Penyelenggaraan informasi geospasial perlu diatur agar tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, undang-undang tentang IG yang dibutuhkan. Pemerintah dan DPR, menanggapi kebutuhan ini dengan menyetujui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG) pada 5 April 2011. Tak sampai sebulan kemudian, tepatnya pada 21 April 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU tersebut. Dengan demikian, UU-IG merupakan regulasi resmi yang menjamin ketersediaan informasi geospasial yang andal.

Informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh masyarakat sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.



The surveying and mapping activities in Indonesia have been carried out to obtain spatial data, which includes geographical positions, geographical names, and names of objects in topographic features. Those data are presented in maps both digital and printed maps. The spatial data can be used by the government and private sectors.

The region of Indonesia, which form the Republic of Indonesia (NKRI), is considerably vast, consisting of thousands islands, and rich of natural resources and others. Geospatial information or commonly known as maps in wider meaning is essentially needed for managing these resources and in order to cope with natural disasters, it is necessary to

The provision of geospatial information needs to be regulated through a law for being compliant, integrated, effective, and efficient to guarantee the accuracy, currency, and conformity to the law. Indeed, a strong regulaiton is required. Therefore, the Government and Parliament responded to this need by approving the Law Number 4 Year 2011 of Geospatial Information (UU-IG) in 5 April 2011. Less than a month later, on 21 April 2011, President Susilo Bambang Yudhoyono endorsed the bill. Hence, the Law of Geospatial Information becomes a formal regulation that ensures the availability of reliable geospatial information.

Selain itu, informasi geospasial sebagai data geospasial yang sudah diolah, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

UU Informasi Geospasial mewujudkan sebuah referensi tunggal dalam industri geospasial yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. Kebijakan 'referensi tunggal' ini diharapkan dapat menjamin informasi geospasial yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan di Indonesia dapat saling terintegrasi.

Menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka perlu dibentuk sebuah badan yang menangani informasi geospasial. Presiden RI, melalui Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 pada 27 Desember 2011, menetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam Perpres ini disebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi BIG, juga susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi, dan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pada Bab XI Pasal 40 perihal Ketentuan Peralihan, yang kemudian dijabarkan dalam Bab VII Pasal 40 Ketentuan Peralihan pada Perpres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial maka bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh BAKOSURTANAL sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG. Dan,

Sejarah Kepala Bakosurtanal - BIG | *Head of Bakosurtanal-BIG History*



Ir. Pranoto Asmoro
(1969 - 1984)



Prof. Dr. Ir. Jacob Rais, M.Sc.
(1984 - 1993)



Dr. Ir. Paul Suharto
(1993 - 1999)



Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar
(1999 - 2002)

An accurate geospatial information, accountable for and easily accessible by the public, is required to be a basis for spatial planning, disaster mitigation, and natural and other resource managementm so it can be harnessed for the prosperity of the people of Indonesia.

In addition, geospatial information, as processed geospatial data, can be used for policy formulation, decision making and/or implementation activities associated with the Earth space.

The Law on Geospatial Information facilitates a single reference in the geospatial industry, which cover the whole area of Indonesia and its jurisdiction. The policy of 'single reference' is expected to ensure that geospatial information conducted by all stakeholders in Indonesia can be integrated each other.

Following the issuance of the Law of Geospatial Information, it is necessary to set up an agency carrying on geospatial information. President, through Presidential Decree Number 94 Year 2011 in 27 December 2011, established the Geospatial Information Agency (BIG) as the agency which its task is to carry out government responsibility in providing geospatial information. The regulation states position, duties, and functions of BIG, as well as organizational structure, work procedures, echelon determination, and financial management.

Based on the Law No. 4 Year 2011 on Geospatial Information in Chapter XI of Article 40 concerning the Transitional Provisions, which are then described in Chapter VII, Article 40 of the Transitional Provisions on Presidential Decree No. 94 Year 2011 concerning the Geospatial Information Agency so that BAKOSURTANAL was still working on tasks related to geospatial information until the completion of organizational structure of BIG. In this case

BAKOSURTANAL wajib menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG.

BIG, yang bertransformasi dari BAKOSURTANAL, berwenang menyelenggarakan informasi geospasial, khususnya untuk informasi geospasial dasar yang terdiri atas jaring kontrol geodesi, dan peta dasar.

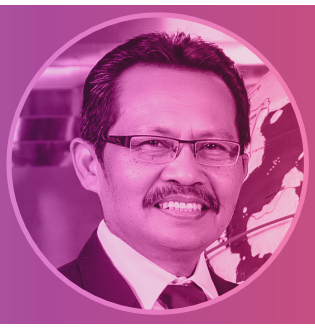
Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horizontal, vertikal, dan acuan gaya berat. Peta dasar, yang meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN), menjadi kerangka bagi pembuatan informasi geospasial tematik.

BIG merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting dalam mengumpulkan dan mendata berbagai informasi mengenai wilayah kedaulatan NKRI. Pasca-transformasi dari BAKOSURTANAL, BIG mendapat tugas lebih luas. BIG tidak hanya terbatas menangani dan mengkoordinasikan kegiatan survei dan pemetaan yang berada di sektor hulu dari rangkaian penyelenggaraan IG, tetapi juga sampai ke sektor hilir, yaitu masalah penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan IG.

Transformasi BAKOSURTANAL menjadi BIG diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keruangan di kalangan pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya aspek geospasial. Dengan demikian, semua keterbatasan yang selama ini dihadapi akan lebih mudah diatasi sehingga terjadi percepatan ketersediaan IG di seluruh Indonesia.



Ir. Rudolf W Matindas, M.Sc.
(2002 - 2010)



Dr. Asep Karsidi, M.Sc.
(2010 - 2014)



Dr. Priyadi Kardono, M.Sc.
(2014 - sekarang)

BAKOSURTANAL should submit all records and documents relating to its duties to BIG.

BIG, that has been transformed from BAKOSURTANAL, has authorities to work on geospatial information, especially for basic geospatial information consisting of geodetic control networks and base maps.

Geodetic control networks are references for horizontal position, vertical position, and gravity. While the base maps, which include Topographic Map of Indonesia (RBI), Coastal Environment Map of Indonesia (LPI), and the National Marine Environment Map (LLN), are the "platform" for the development of thematic geospatial information.

BIG is a very important government agency in collecting and recording information about the sovereign regions of the Republic of Indonesia. It has broader tasks following the transformation from BAKOSURTANAL. BIG is not only handling and coordinating any surveying and mapping activities in the upstream sectors of the connecting structure of geospatial information implementation, but also in the downstream sectors, such as the issues of storage, security, dissemination, and utilization of geospatial information.

The transformation of BAKOSURTANAL into BIG is expected to improve geospatial awareness within government and communities on the importance of geospatial aspects. Hence, the agency will be easily overcome all the constraints it deals with so that it will result in accelerating the availability of geospatial information across Indonesia.

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial 2013-2014

Sebagai konsekuensi transformasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) maka badan baru tersebut harus menyusun program kegiatan yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh pelaku dan pengguna produk dari kegiatan survei dan pemetaan.

Rencana Strategis (Renstra) BIG 2013-2014 merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara rinci dalam kurun waktu antara tahun 2013 - 2014.

Selain itu, Renstra BIG Tahun 2013-2014 disusun untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja BIG kepada publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.

Arti

Integritas, Visioner, Tanggung Jawab, Kerjasama

Nilai

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

The Strategic Planning of Geospatial Information Agency 2013-2014

As a consequence of the transformation of Bakosurtanal into Geospatial Information Agency (BIG), this new agency should formulate actual and relevant programs that are useful to all practitioners and the end-users from surveys and mapping activities.

The BIG Strategic Plan 2013-2014 is the main reference in planning and implementing programs and activities of the organisation of geospatial data and information in the period of 2013 - 2014.

In addition, the BIG Strategic Plan 2013-2014 is formulated to achieve a clean and good governance and to reflect the accountability of BIG performance to the public in implementing its mandated tasks and functions.

Meaning

Integrity, Visionary, Responsibility, Cooperation

Value

Together Managing Better Indonesia

Visi

Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah Dimanfaatkan

Misi

Misi BIG ditetapkan sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, antara lain:

1. Membangun dan memperkuat koordinasi kelembagaan terkait penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif, efisien, dan sistematis.
2. Membangun data dan informasi geospasial yang berkualitas dan berkelanjutan dengan multi-resolusi dan multi-skala dalam satu referensi tunggal, serta mudah dimanfaatkan secara cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial serta mendorong pemanfaatannya.

Vision

To be a Leading Agency in Providing Reliable, Integrated and Manageable Geospatial Information

Mission

BIG's missions, that are formulated and implemented to achieve the vision, are as follows:

1. *To develop and strengthen coordination between institutions related to the provision of effective, efficient, and systematic geospatial information.*
2. *To build qualified and sustainable geospatial data and information using multi-resolutions and multi-scales within a single reference that is easy to use and accountable.*
3. *To enhance institutional capacity, human resources, quality of research and development in providing geospatial information and encouraging its utilization*

Tujuan

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka mewujudkan visi BIG maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Menyediakan landasan sistem pengaturan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan informasi geospasial;
2. Menyediakan data dan informasi geospasial dasar yang akurat, berkualitas, dan mutakhir;
3. Menyediakan data dan informasi geospasial tematik dalam pemenuhan kebutuhan nasional;
4. Mengoperasionalkan jaringan informasi geospasial antar simpul jaringan nasional yang terhubung secara elektronik; dan.
5. Menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi, serta penelitian dan pengembangan kompetensi, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap aplikasi teknologi geospasial.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis BIG adalah :

1. Penguatan koordinasi antar lembaga/institusi, badan usaha yang mempunyai kemampuan ataupun bergerak di bidang informasi geospasial;
2. Mempercepat produksi dan dokumentasi fundamental informasi geospasial;
3. Membangun mekanisme distribusi dan penggunaan serta meningkatkan aksesibilitas informasi geospasial;
4. Meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial.

Objectives

Based on the identification of potentials and problems in order to achieve the BIG's vision, the goals of BIG are:

1. *Providing a basic system on regulation, acquisition, processing, storage, dissemination, and usage of geospatial information;*
2. *Providing accurate, qualified, and up-to-date basic geospatial data and information;*
3. *Providing thematic geospatial data and information to fulfill the national need;*
4. *Operating the geospatial information network between national network nodes that are electronically connected; and*
5. *Providing competence human resources, conducting research and development related to thehuman resource competency, and conducting research and development on science and technology of geospatial applications.*

Strategic Goals

BIG's strategic goals are:

1. *Strengthening coordination among government agencies/institutions and business entities working on the provision of geospatial information;*
2. *Accelerating the production and fundamental documentation of geospatial information;*
3. *Developing the distribution and usage mechanisms of geospatial information and enhancing the accessibility of the information;*
4. *Enhancing institutional and human resources of geospatial information.*

Sekretariat Utama

Main Secretariat

Sasaran Strategis

Tahun 2014 Sekretariat Utama BIG telah menetapkan dua sasaran strategis yang kemudian dielaborasi menjadi 9 indikator kinerja yang hasilnya merupakan *outputs* dan *outcomes* dari program dan kegiatan yang telah direncanakan. Capaian dan evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada hasil pengukuran kinerja, kemudian dilakukan penilaian masing-masing sasaran. Sasaran tersebut adalah tersedianya aturan/panduan penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial.

Program Reformasi Birokrasi (RB) yang telah bergulir sejak tahun 2007 sudah memasuki akhir masa pelaksanaan periode tahun 2010-2014. Sesuai arahan dari kementerian PAN-RB maka setiap kementerian dan lembaga wajib melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan RB di setiap lembaga. Untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan RB di BIG maka dilakukanlah pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan RB di BIG.

Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan oleh BIG mampu memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas program-program RB di lingkungan BIG dengan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kegiatan penilaian ini merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri *(self assessment)*.

Strategic Objectives

In 2014, the Main Secretariat of BIG has set two strategic objectives that were elaborated into 9 performance indicators, where the results are considered as outputs and outcomes of the programs and activities. The achievements and performance evaluation have been conducted by referencing to the result of performance assessment, followed by assessment on individual objective. The strategic objectives were the availability of regulation/guidelines on single reference of geospatial information and implementation of bureaucratic reform in BIG.

The program of bureaucratic reform that began in 2007 has entered its final period of 2010-2014. In accordance to the instruction of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, each ministry and institution is obligatory to conduct evaluation related to the implementation of bureaucratic reform in their respective institutions. Data related to the implementation of bureaucratic reform in BIG has been collected in order to obtain information regarding the progress of the bureaucratic reform in BIG.

An assessment is required to observe the extent of the conformity of bureaucratic reform implemented by BIG could fulfill the public expectation. The assessment of bureaucratic reform programs in BIG should be conducting using an assessment method that is in conformity to the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 1 Year 2012 on Self-Assessment Guidelines on the Implementation of Bureaucratic Reform (PMPRB). This assessment is a self-assessment instrument to assess the improvement of implementation of bureaucratic reform.

Tersedianya aturan/panduan penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal.

Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja dapat dilihat dari 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Secara keseluruhan telah dihasilkan sebanyak 3 Peraturan Kepala BIG terkait hal ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala tindak lanjut PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dengan 6 Rancangan Perka BIG.

Selain beberapa peraturan yang telah disebutkan, pada tahun 2014 telah dihasilkan 3 peraturan perundangan mengenai sistem referensi tunggal penyelenggaraan IG secara nasional, yaitu:

a. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
b. Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial
c. Peraturan Kepala BIG Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG).

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Terdapat 7 indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur keberhasilan capaian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama BIG. Ketujuh indikator kinerja tersebut adalah:

1. Prosentase hasil penilaian reformasi birokrasi (45,17%).
2. Prosentase pelaksanaan SOP di BIG (70%).
3. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai rencana strategis SDM (34,37%).
4. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (kategori B).
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (TMP).
6. Jumlah permintaan layanan jasa dan produk IG yang diberikan kepada instansi dan masyarakat (3.174 layanan).
7. Jumlah dokumen perencanaan yang mengacu kepada Renstra BIG (10 dokumen).

Availability of Regulation/Guidelines on Single Reference GI

The achievement of BIG's performance can be seen from 2 performance indicators. Those indicators are:

1. *Head of BIG Regulation as the follow up of the Government Regulation Number 8 Year 2013 on Accuracy of Spatial Planning Map; in this case 3 regulations have been published.*
2. *Head of BIG Regulations as the follow up of the Government Regulation Number 9 Year 2014 on the Implementation of Regulation Number 4 Year 2011 on Geospatial Information; 6 draft of documents regulation have been succesfully prepared.*

In addition to the several aforementioned regulations, in 2014, there were 3 regulations on single reference system of the national implementation of GI had been issued, those are:

1. *Ratification of the Presidential Decree Number 27 Year 2014 on National Geospatial Information Network (JIGN).*
2. *Head of BIG Regulation Number 1 Year 2014 on Certification System in the field of Geospatial Information.*
3. *Head of BIG Regulation Number 4 Year 2014 on the Agency for Service Development of Geospatial Information (LPJIG).*

Implementation of Bureaucratic Reform in Geospatial Information Agency

There were 7 performance indicators that used as benchmarks to assess the success of the achievement of the programs and activities in the Main of BIG Secretariat. The performance indicators are as follows:

1. *Percentage of bureaucratic reform assessment result (45.17%).*
2. *Percentage of SOP implementation in BIG (70%).*
3. *Percentage of HR with competence corresponding to HR strategic plan (34.37%)*
4. *Score on evaluation result of performance accountability of government institutions (B grade).*
5. *The opinion of BPK on the Financial Report (No opinion).*
6. *The quantity of service request of geospatial information products provided to institutions and public (3174 services).*
7. *The number of planning documents related to BIG strategic plans (10 documents).*

Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan SDM BIG per Mei 2014 adalah 671 orang. Berdasarkan golongan, jumlah personil Golongan IV sebanyak 98 orang (14,60 %), Golongan III sebanyak 485 orang (72,28 %), dan Golongan II sebanyak 88 orang (13,12 %).

Dari total 671 orang SDM, sebanyak 471 (70,19%) di antaranya adalah laki-laki, dan 200 orang lainnya dalah wanita (29,81%). Yang menduduki jabatan struktural sebanyak 68 orang, dan 603 mengikuti jenjang karier dan kepangkatan melalui jabatan fungsional.

Tahun 2014 BIG mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yaitu para pegawai di lingkungan BIG. Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan BIG yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sekretariat Utama tahun 2014 adalah sebanyak 75% dari jumlah pegawai. Peningkatan kompetensi yang diberikan berupa pendidikan dan pelatihan yang sudah melalui tahap analisa dan pengkajian sebelumnya.

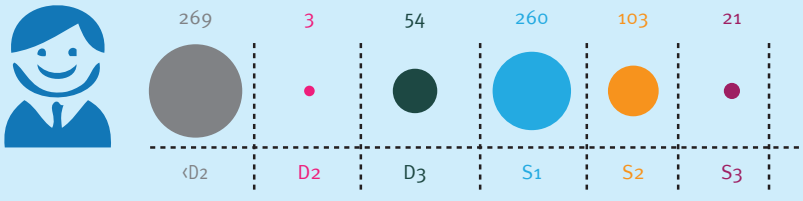
Human Resources

The total number of BIG HR per December 2013 was 671 people. Based on to the classification system, the number of people in Rank IV were 98 people (14.60%), Rank III were 485 people (72.28%), and Rank II were 88 people (13.12%).

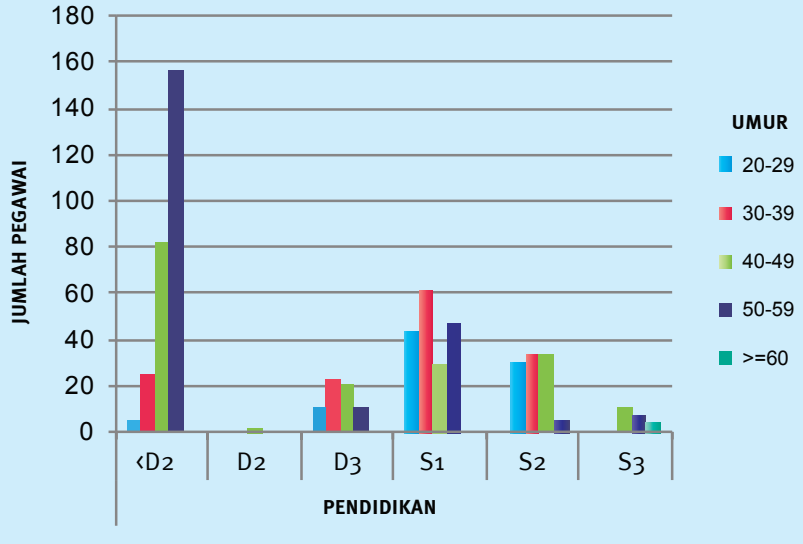
Of a total 671 people, 471 people (70.19%) of them were male, while 200 people were female (29.81%). Meanwhile 68 people are in structural positions, and 603 people are building their careers through functional positions.

In 2014, the Employee and Organization Divison under the Main Secretariat received an increase of budget allocation for developing competencies of the BIG's human resources. This indicates the available support from the leaders to the employee's competence improvement. It has been decided in the Main Secretariat that performance indicators 2014 that the increase of HR competence in BIG was as much as 75% of the employees. The improvement of competencies provided in the form of education and trainings that have undergone based on previous research and analystis.

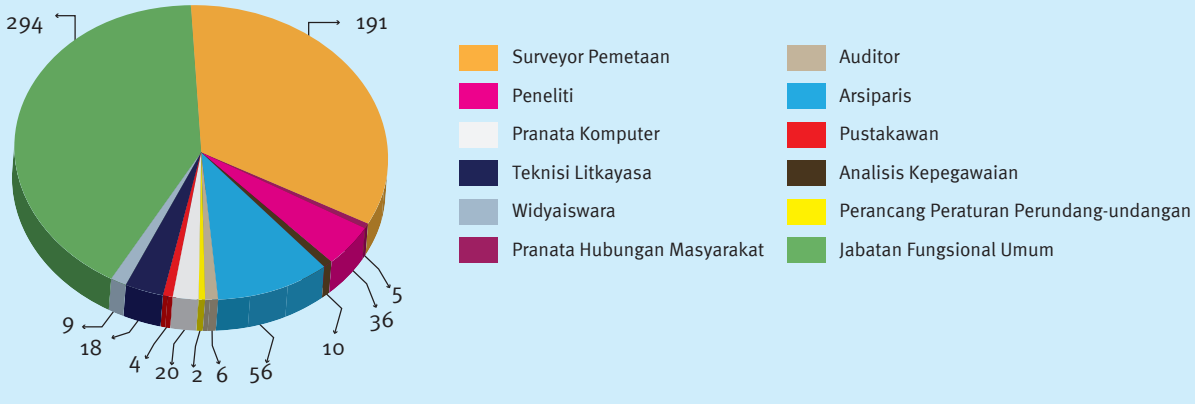
Jumlah Pegawai BIG berdasarkan Pendidikan Terakhir



Jumlah Pegawai BIG berdasarkan Usia dan Pendidikan Terakhir



Jumlah Pegawai BIG berdasarkan Jabatan Fungsional



Penerimaan CPNS 2014

Sejak moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah berlangsung selama 16 bulan dan berakhir 31 Desember 2012, BIG tidak melakukan penerimaan CPNS baru. Moratorium ini dilaksanakan dengan dasar untuk penataan-ulang kebijakan dan sistem kepegawaian. Dengan berakhirnya masa moratorium, pada Tahun 2013, BIG menerima CPNS sebanyak 79 orang dan pada tahun 2014 BIG menerima CPNS sebanyak 77 orang.

New Employee Recruitment in 2014

Since the moratorium on the acceptance of candidates of Civil Servants (CPNS) that has lasted for 16 months and ended in December 31, 2012, BIG did not recruit new CPNS. The moratorium was implemented on the basis of rearrangement of policies and personnel systems. Following the end of the moratorium, BIG held CPNS acceptance tests and has recruited 79 new employees in 2013 and another 77 new employees in 2014.



CPNS 2014 di depan Kapal KRI Banda Aceh



Masa Orientasi CPNS 2014

Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Tahun 2014

	PIHAK 1	PIHAK 2	MOU/PKS	TENTANG
1	Badan Informasi Geospasial	Pusat Pelayanan Informasi Kebumian (PPIK) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
2	Badan Informasi Geospasial	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPN "Veteran" Yogyakarta)	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
3	Badan Informasi Geospasial	Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
4	Badan Informasi Geospasial	Program Studi Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
5	Badan Informasi Geospasial	Koperasi Wanadri Bandung	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
6	Badan Informasi Geospasial	Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Malang	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
7	Badan Informasi Geospasial	Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
8	Badan Informasi Geospasial	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
9	Badan Informasi Geospasial	Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
10	Badan Informasi Geospasial	Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
11	Badan Informasi Geospasial	Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
12	Badan Informasi Geospasial	Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
13	Badan Informasi Geospasial	Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
14	Badan Informasi Geospasial	Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
15	Badan Informasi Geospasial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	PKS	Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial
16	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Klaten	MoU	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemanfaatan Data Serta Informasi Geospasial di Kabupaten Klaten
17	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Klaten	PKS	Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Klaten
18	Badan Informasi Geospasial	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	PKS	Pengelolaan Data dan Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
19	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Mamuju	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Serta Informasi Geospasial di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
20	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias	PKS	Pemetaan Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kepulauan Nias
21	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan	PKS	Pemetaan Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Imekko, Provinsi Papua Barat
22	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Paser	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
23	Badan Informasi Geospasial	Universitas Indonesia	MoU	Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial
24	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	MoU	Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Informasi Geospasial Guna Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
25	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
26	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Serta Informasi Geospasial di Kabupaten Kepulauan Talaud
27	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	PKS	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Bantul	PKS	Pemetaan Kemiskinan Berbasis Web di Kabupaten Bantul
29	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	MoU	Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial
30	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
31	Badan Informasi Geospasial	Kepolisian Negara Republik Indonesia	MoU	Penyelenggaraan Pengamanan Aset, Penegakan Hukum dan Informasi Geospasial
32	Badan Informasi Geospasial	PT. Geo Spasial Indonesia	MoU	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Penyelenggaraan Informasi Geospasial
33	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Banyuwangi
34	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Boalemo
35	Badan Informasi Geospasial	Institut Teknologi Padang	MoU	Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial
36	Badan Informasi Geospasial	Universitas Ibn Khaldun Bogor	MoU	Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial
37	Badan Informasi Geospasial	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	MoU	Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Informasi Geospasial Pada Pusat Data Sumberdaya Alam/Pusat Data Provinsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Seluruh Indonesia
38	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kota Balikpapan	MoU	Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Informasi Geospasial Guna Mendukung Pembangunan Daerah Kota Balikpapan
39	Badan Informasi Geospasial	Institut Teknologi Bandung	PKS	Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma Satu Bidang Survei dan Pemetaan
40	Badan Informasi Geospasial	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	PKS	Implementasi Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
41	Badan Informasi Geospasial	Gubernur Jawa Tengah	MoU	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah





Layanan Peta

Layanan peta yang ada di Sentra Peta sebagai tugas BIG dalam memberikan pelayanan jasa dan produk geospasial kepada masyarakat luas.

Di sini melayani berbagai produk yang dibagi menjadi tujuh kelompok: Produk Peta; Produk Data Dasar; Produk Inderaja; Produk Pedoman; Standardisasi, dan Spesifikasi Teknis; Buku Ilmu Pengetahuan/Laporan Survei dan Pemetaan; Katalog Produk, dan; Program Aplikasi Sistem Infromasi Geografi (SIG).

Pada tahun 2014 jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebanyak 7.299 layanan. Dari total tersebut sejumlah 3.163 menghasilkan suatu transaksi dan 4.136 berupa informasi. Dari layanan yang berupa transaksi 1.342 layanan diberikan kepada perusahaan swasta, 1.156 layanan disampaikan kepada perorangan, dan jumlah layanan kepada instansi pemerintah diberikan sebanyak 355 layanan. Layanan peta selain diselenggarakan di BIG Cibinong, juga diselenggarakan di 27 Sentra Peta yang tersebar di Indonesia. Jumlah layanan di Sentra Peta Daerah adalah sejumlah 377 layanan.

Map Services

Map services located at the Central Map is part of the function of technical implementation unit in providing geospatial services and products. There are seven categories of product services: maps, basic data, remote sensing data, document guidelines, document of standardization, and technical specification, book on science and reports on surveying and mapping, catalogs, and Geographical Information System (SIG) Application Program.

In 2014 the services provided to the people recorded as much as 7,299 services, comprises of 3,163 services yielded on transactions and 4,136 services on the form of information. Among the transactions services, 1,342 services were provided to private companies, 1,156 services provided to individuals, and 355 services provided to government. Besides conducted at the BIG office in Cibinong, the map services have also conducted by the 27 Regional Map Centers throughout Indonesia. The number of services carried out by the Regional Map Centers recorded for 377 services.





PROSEDUR MEMPEROLEH PRODUK GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PENGGUNA DATA

PRODUK CETAKAN

PRODUK DIGITAL

FOTO UDARA

Menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Informasi Geospasial Digital

- Permohonan SC ke: DIRWILHAN KEMHAN
- Tembusan Surat ke: Ka. BIG

Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS)

Security Clearance (SC) keluar

Waktu Pelayanan:
Senin - Jum'at
Jam 08.00 - 15.30
di Gedung C Lt. 1

Layanan Laboratorium Geospasial

Layanan ini merupakan laboratorium geospasial yang dinamakan Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis, yang terletak di Dusun Depok, Parangtritis, Bantul, sekitar 30 km selatan Kota Yogyakarta.

Laboratorium ini merupakan wujud kerjasama antara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (melalui Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 menjadi Badan Informasi Geospasial/ BIG), Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Pemerintah DI Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sebagai satu-satunya laboratorium geospasial pesisir di Indonesia, akan menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menjadikan laboratorium ini bermanfaat dalam menyumbangkan berbagai hasil kajian riset geospasial pesisir dan laut.

Laboratorium Geospasial Pesisir memiliki tujuan menjadikan Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis sebagai *center of excellent* bagi Kajian penelitian kepesisiran dan laut berbasis geospasial di Indonesia.

Dengan fasilitas yang lengkap Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis dapat menjadi tempat belajar baik para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Di samping itu dapat mengaplikasikan berbagai hasil penelitian untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, sarasehan, maupun festival ekoturisme.

Jumlah pengunjung dari berbagai kalangan (siswa TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, para peneliti serta masyarakat umum) menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 pengunjung yang datang berjumlah 2.515 orang sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 7.211 orang (187%).

Geospatial Laboratory Services

This service is a geospatial laboratory entitled Parangtritis Coastal Geospatial Laboratory. This laboratory is located in Depok Village, Parangtritis, Bantul, about 30 km south of Yogyakarta City.

The Laboratory was established based on cooperation between the Coordinating Agency for National Surveys and Mapping and (currently became Geospatial Information Agency/BIG based on Presidential Decree Number 94 Year 2011), Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, the Yogyakarta Province and the Regency of Bantul.

This laboratory is the only coastal geospatial laboratory in Indonesia. Hence, there are opportunities as well as challenges to make this laboratory useful and provide significant contributions to various coastal and maritime geospatial researches.

The Coastal Geospatial Laboratory aims on making this laboratory as center of excellence for coastal and maritime study and research based on geospatial data and information in Indonesia.

With a complete facility, the Coastal Geospatial Laboratory could be a center to study for both students as well as public. In addition, various research results could also be applied to the benefit of the people in general through several activities such as counseling, workshops, and ecotourism festival.

The number of visitors that comes from various backgrounds (kindergarten, elementary, junior and senior high school students, as well as college students, researchers and the public in general) has increased significantly. In 2013 the number of visitors was 2,515 people, while in 2014 has increased to 7,211 people (187%).



Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis Yogyakarta I

Parangtritis Coastal Geospatial Laboratory Yogyakarta



Ruang Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis Yogyakarta I

Hall of Parangtritis Coastal Geospatial Laboratory Yogyakarta

Layanan Diklat

Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Geospasial merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia informasi geospasial melalui serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Informasi Geospasial tidak terlepas dari dinamika pengetahuan dan teknologi informasi geospasial yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi, di satu sisi, telah mampu mendongkrak efektifitas, efiesiensi dan produktifitas kerja, namun disisi lain, kemajuan ini menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dari SDM di Bidang Informasi Geospasial.

Pelatihan yang ditawarkan oleh BIG ini dikelompokkan menjadi empat kelompok: Sistem Informasi Geografis, Penginderaan Jarak Jauh, Survei dan Pemetaan, serta Fungsional Surveyor Pemetaan.

Adapun jumlah diklat yang dilaksanakan pada tahun 2014 sejumlah 40 kali dari berbagai kelompok diklat diantaranya Diklat SIG Dasar hingga Lanjutan, Diklat Tata Ruang, Diklat Pemetaan Dasar dan sebagainya. Layanan ini bisa dihubungi di telepon 021-8754601 dan website www.diklatgeospasial.co.nr.

Training Services

Services on Geospatial Training is among the services provided by BIG for capacity building in order to improve the quality of human resources in geospatial information through a series of training activities.

The training and capacity building on geospatial information is inseparable from the dynamics of the development of knowledge and technology related to geospatial information.

The advancements in science and technology has been able to improve effectiveness, efficiencies and productivity of work, but on the other hand, this progress requires knowledgeable, skillful and experienced of human resources in the field of geospatial information.

The training offered by BIG is categorized into four groups: Geographic Information Systems, Remote Sensing, Surveying and Mapping, and the Functional Training for Surveyor Mapping.

The number of trainings conducted in 2014 accounted for 40 times in various groups of training such as Training on Basic to Advance GIS, Training of Spatial Planning, Training on Basic Mapping, etc. The training center can be contacted by phone on 021-8754601 and website at www.diklatgeospasial.co.nr.

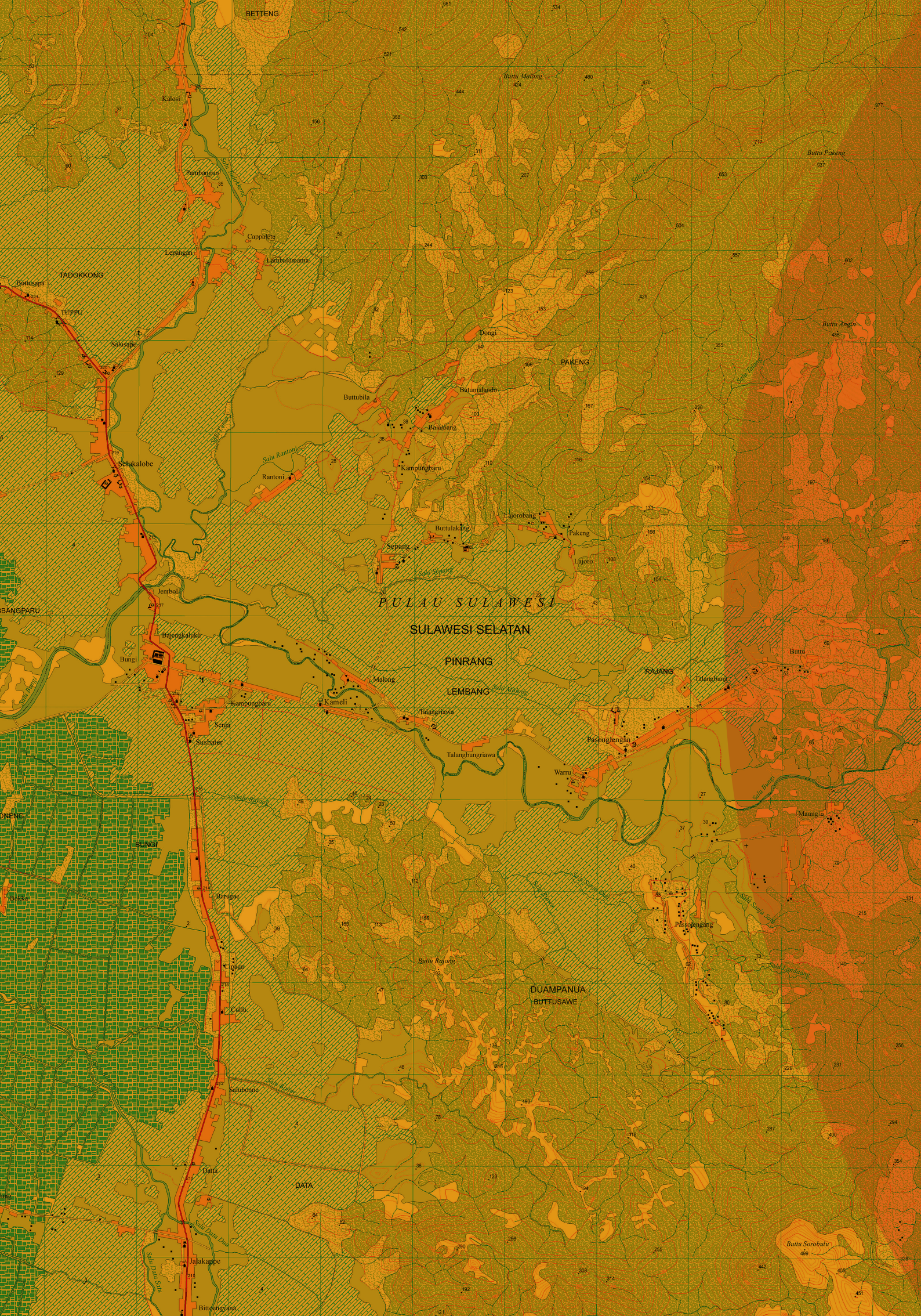


LAYANAN JASA DIKLAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

- **SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**
  - SIG TINGKAT DASAR
  - SIG TINGKAT LANJUT
  - SIG TINGKAT MANAJER
  - DESKTOPGIS OPEN SOURCE
  - WEBGIS OPEN SOURCE
  - PENYUSUNAN BASIS DATA GEOSPASIAL UNTUK PEMETAAN TATA RUANG
- **PENGINDERAAN JAUH**
  - TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMETAAN LIPUTAN LAHAN
  - TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH UNTUK PEMETAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
  - TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH SIG UNTUK INVENTARISASI DAN EVALUASI SDA
- **SURVEI DAN PEMETAAN**
  - SURVEI PEMETAAN TINGKAT DASAR
  - SURVEI PEMETAAN TINGKAT LANJUT
  - APLIKASI GPS UNTUK PEMETAAN
  - APLIKASI GPS UNTUK PENGUKURAN POSISI TELITI
  - SURVEI TOPONIM
- **JABATAN FUNGSIONAL**
  - JABATAN FUNGSIONAL SURVEI PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL
  - JABATAN FUNGSIONAL SURVEI PEMETAAN TINGKAT AHLI

Penyelenggaraan DIKLAT bisa menguhubungi :
Telp : +6221-8754601
Fax : +6221-8763856
Hp : 0812.1929.6777
Email : diklat@big.go.id
Website: www.big.go.id/jasa-diklat/
Blog : www.diklatgeospasial.co.nr
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46
Cibinong, Bogor - Jawa Barat 16911
Twitter : @DiklatBIG
Facebook : Diklat Geospasial




BETTENG
Kalosi
Pambangun
Cappalete
Lepangan
Lambulomama
TADOKKONG
Buttusapa
TUPPU
Salusape
Selukalobe
Rantoni
Buttubila
Batumalando
Balaloang
Kampungbaru
PAKENG
Dongi
Buttu Malang
Buttu Pakeng
Buttu Angin
Lajorobang
Buttulakang
Pakeng
Lajoro
Sepang
Jembol
BBANGPARU
PULAU SULAWESI
SULAWESI SELATAN
PINRANG
LEMBANG
RAJANG
Bungi
Bajongkaluku
Malung
Kameli
Kampungbaru
Senja
Sushater
Talangriawa
Talangbungriawa
Pasonglengan
Warru
Talanghung
Buttu
Maung
Pasolengeang
Buttu Rajang
DUAMPANUA
BUTTUSAWE
BUNGI
Bekka
Barugae
Culu
Salubonno
Datta
DATA
Jalakappe
Bittoengyang
Buttu Sorobulu
Salu Rantoni
Salu Senja
Salu Bungi
Salu Malang
Salu Lemo
Salu Tabang
Salu Lambulomama
Salu Data Dua
Salu Data Satu